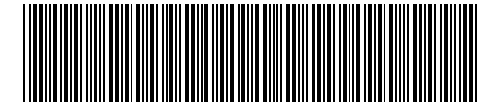




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.667774/2021**



DS:9105-1029-6008-9508

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (667774) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
- Sebesar : Rp. 1.341.596.000 ( SATU MILIAR TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Jumlah Uang  
Rp. 1.341.596.000  
Rp. 1.341.596.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	1.341.596.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 1.341.596.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



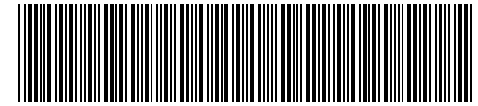
DS:9105-1029-6008-9508

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (33) PAPUA BARAT  
Kode>Nama Satker : (667774) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.341.596.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	1.341.596.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Jumlah Layanan Perkantoran	
	: 3. 01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)	
	: 4. 01	Jumlah UPT Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT Pemasarakatan	
	: 5. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 6. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 7. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 8. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 9. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 10. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 11. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 12. 01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	
	: 13. 02	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	
	: 14. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 15. 02	Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 16. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 17. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 18. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	
	: 19. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 20. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 21. 02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaaan	
	: 22. 03	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9105-1029-6008-9508

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (33) PAPUA BARAT  
Kode>Nama Satker : (667774) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 2

---

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

- |        |   |
|--------|---|
| 23. 03 | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal          |
| 24. 03 | Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum  |
| 25. 03 | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib              |
| 26. 03 | Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya  |
| 27. 03 | Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan   |
| 28. 03 | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan  |
| 29. 03 | persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar   |
| 30. 04 | Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)   |
| 31. 04 | Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin                          |
| 32. 04 | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani                                      |
| 33. 04 | Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal   |
| 34. 04 | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas   |
| 35. 04 | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu                            |
| 36. 05 | Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)  |
| 37. 05 | Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi                                    |
| 38. 05 | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar                                  |
| 39. 06 | Jumlah Layanan Perkantoran  |
| 40. 06 | Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan  |
| 41. 06 | Persentase narapidana yang bekerja dan produktif  |
| 42. 06 | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar  |
| 43. 07 | Jumlah Kendaraan Bermotor   |
| 44. 07 | Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi  |
| 45. 07 | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) |
-

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9105-1029-6008-9508

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (33) PAPUA BARAT  
Kode>Nama Satker : (667774) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 3

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

46. 08	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
47. 08	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
48. 09	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
49. 10	Jumlah Gedung/Bangunan

Klasifikasi Rincian Output 1	:	5252.AEA	Koordinasi	10,00	kegiatan	538.352.000	
Rincian Output	:	01	AEA.001	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasarakatan di Wilayah	10,00	kegiatan	538.352.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	48,00	orang	309.944.000	
Rincian Output	:	01	AEF.001	Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	48,00	orang	309.944.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi	493.300.000	
Rincian Output	:	01	BHB.001	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12,00	operasi	493.300.000

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

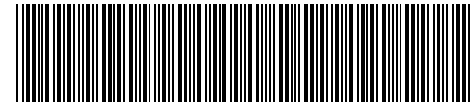
ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2021**

**I B. SUMBER DANA**



DS:9105-1029-6008-9508

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
 Provinsi : (33) PAPUA BARAT  
 Kode>Nama Satker : (667774) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	1.341.596.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.341.596.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2021  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9105-1029-6008-9508

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (33) PAPUA BARAT  
Kode>Nama Satker : (667774) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT  
Kewenangan : (KD)

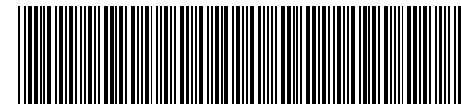
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667774	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	-	1.341.596	-	-	-	1.341.596		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.341.596	-	-	-	1.341.596		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	1.341.596	-	-	-	1.341.596		
5252.AEA	Koordinasi (33.01 PAPUA BARAT / KAB. MANOKWARI)	-	538.352	-	-	-	538.352	33 . 01	
01	RM	-	538.352	-	-	-	538.352	065	
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	309.944	-	-	-	309.944	33 . 00	
01	RM	-	309.944	-	-	-	309.944	065	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	493.300	-	-	-	493.300	33 . 00	
01	RM	-	493.300	-	-	-	493.300	065	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1.341.596</b>	-	-	-	<b>1.341.596</b>		

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2021  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9105-1029-6008-9508

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (33) PAPUA BARAT  
Kode>Nama Satker : (667774) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

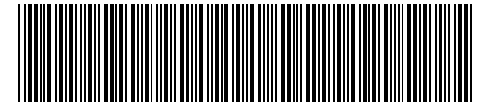
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667774	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	1.100	61.724	309.757	177.062	167.414	105.380	44.424	117.260	78.684	138.145	13.680	126.966	1.341.596
		<b>BELANJA BARANG</b>	1.100	61.724	309.757	177.062	167.414	105.380	44.424	117.260	78.684	138.145	13.680	126.966	1.341.596
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	1.100	61.724	309.757	177.062	167.414	105.380	44.424	117.260	78.684	138.145	13.680	126.966	1.341.596
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.100	61.724	309.757	177.062	167.414	105.380	44.424	117.260	78.684	138.145	13.680	126.966	1.341.596

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2021  
IV A. B L O K I R**



DS:9105-1029-6008-9508

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [33] PAPUA BARAT  
Kode dan Nama Satker : [667774] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332



**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667774/2021  
IV B. C A T A T A N**



DS:9105-1029-6008-9508

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [33] PAPUA BARAT  
Kode dan Nama Satker : [667774] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332